

PENGADILAN NEGERI KISARAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2016

Jl. Ahmad Yani No. 33 Kisaran

Asahan - Sumatera Utara 21214

Telp. 0623 41389 Fax. 0623 41396

e-mail : pengadilannegerikisaran@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ahmad Yani No. 33 Kisaran

Telp. 0623 41389 Fax. 0623 41396

Asahan - Sumatera Utara 21214

e-mail : pengadilannegerikisaran@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Kisaran adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kisaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Kisaran. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Asahan, 31 Desember 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,
SEKRETARIS

JULIARNO, SH
NIP.19590204 197903 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Dasar Hukum.....	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Kisaran	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
A.4. Basis Akuntansi	12
A.5. Dasar Pengukuran	12
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja.....	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
C.1. Aset Lancar.....	24
C.2. Aset Tetap	27
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	31
D.2. Beban Pegawai	31
D.3. Beban Persediaan	32

D.4.	Beban Barang dan Jasa	32
D.5.	Beban Pemeliharaan	32
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	33
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	33
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	33
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	34
D.11.	Beban Lain-lain.....	35
D.12.	Kegiatan Non Operasional	35
D.13.	Pos Luar Biasa	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
E.1.	Ekuitas Awal	36
E.2.	Surplus (defisit) LO	36
E.3.	Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas.....	36
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.5.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	38
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	38
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	38
Daftar dan Lampiran		
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	442
	Daftar Hibah Langsung.....	44

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Ahmad Yani No. 33 Kisaran Asahan - Sumatera Utara 21214

Telp. 0623 41389 Fax. 0623 41396 e-mail : pengadilannegerikisaran@yahoo.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kisaran yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kisaran telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Asahan, 31 Desember 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,

SEKRETARIS,



JULI ARNO, SH

NIP.19590204 197903 1 001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8.026.419 atau mencapai 40,55 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 19.793.622.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 5.332.158.202,- atau mencapai 94,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.622.504.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.813.048.441,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 34.442.015,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 7.778.606.426,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.579.250 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 7.811.469.191,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.80.619,-, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp. 5.172.938.559,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 5.168.136.940,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 5.312.675 dan Rp. 0,- sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. 5.162.824.265,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp. 7.877.819.941,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 5.162.824.265,- kemudian dikurangi dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp. 0,-, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (227.658.268),- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.324.131.783,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 7.811.469.191,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI KISARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	19.793.622	8.026.419	40,55	39.163.850
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		19.793.622	8.026.419	40,55	39.163.850
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.403.554.000	4.157.466.532	94,41	4.644.257.949
2.	Belanja Barang	B.2.2.	632.950.000	619.311.670	97,84	589.871.878
3.	Belanja Modal	B.2.3.	586.000.000	555.380.000	94,77	480.461.125
	Jumlah Belanja Negara		5.622.504.000	5.332.158.202	94,84	5.714.590.952

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI KISARAN
NERACA
PER 31 Desember 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1. 2.	14.736.770	0
Persediaan	C.1. 3.	19.705.245	1.327.600
Jumlah Aset Lancar		34.442.015	2.969.350
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	2.456.455.000	2.456.455.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.399.048.359	1.313.193.359
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.862.034.649	6.392.509.649
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	150.225.000	150.225.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5.326.811	7.271.288
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(3.094.483.393)	(2.444.803.705)
Jumlah Aset Tetap		7.778.606.426	7.874.850.591
Jumlah Aset		7.813.048.441	7.877.819.941
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.3			
Uang Muka dari KPPN	C.3. 1.	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3. 2.	1.579.250	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.579.250	0
Jumlah Kewajiban		1.579.250	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana			
C.4			
Jumlah Ekuitas Dana		7.811.469.191	7.877.819.941
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7.813.048.441	7.877.819.941

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI KISARAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	4.801.619	8.348.150
Jumlah Pendapatan		4.801.619	8.348.150
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	4.142.729.762	4.644.257.949
Beban Persediaan	D. 3	29.716.599	17.485.859
Beban Barang dan Jasa	D. 4	318.679.111	326.628.949
Beban Pemeliharaan	D. 5	178.441.400	166.007.929
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	79.414.040	79.563.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	423.965.897	388.691.537
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	(8.250)	(33.000)
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5.172.938.559	5.622.602.223
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.168.136.940)	(5.614.254.073)

Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0	20.614.286
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.312.675	2.315.700
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		5.312.675	22.929.986
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(5.162.824.265)	(5.591.324.087)
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(5.162.824.265)	(5.591.324.087)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI KISARAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Ekuitas Awal	E. 1	7.877.819.941	8.448.722.267
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.162.824.265)	(5.591.324.087)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E. 3	(227.658.268)	(655.005.341)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3 1	0	768.659
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3 2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3 3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3 4	(227.658.268)	(655.774.000)
Koreksi Lain-lain	E. 3 5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5.324.131.783	5.675.427.102
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E. 4 1	5.324.131.783	5.675.427.102
Transfer Masuk/ Transfer Keluar	E. 4 2	0	0
Ekuitas Akhir	E. 5	7.811.469.191	7.877.819.941

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Kisaran

Visi Pengadilan Negeri Kisaran adalah

*"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG PADA
PENGADILAN NEGERI KISARAN"*

Misi Pengadilan Negeri Kisaran adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Kisaran melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Kisaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

-) Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
-) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
-) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
-) Tagihan Penjuala Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp8.026.419*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 8.026.419 atau mencapai 40,55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 19.793.622. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kisaran adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.347.962	3.862.059	115,35
2.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	4.950.000	1.650.000	33,33
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11.495.660	939.560	8,17
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.574.800	0,00
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
Total Pendapatan		19.793.622	8.026.419	40,55

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.137.431 atau 79,50 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena:

1. Telah lunasnya pembayaran tuntutan ganti rugi an. Azhar, SH.;
2. Tidak adanya pengajuan permintaan Persekot/ Uang Muka Gaji;
3. Tidak adanya penjualan BMN pada tahun 2016.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2016	2015	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.862.059	3.383.650	478.409	14,13
2.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1.650.000	6.600.000	(4.950.000)	(75,00)
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	939.560	4.964.500	(4.024.940)	(81,07)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.574.800	2.315.700	(740.900)	(31,99)
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	21.900.000	(21.900.000)	(100,00)
Total Pendapatan		8.026.419	39.163.850	(31.137.431)	0,00

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
5.332.158.202

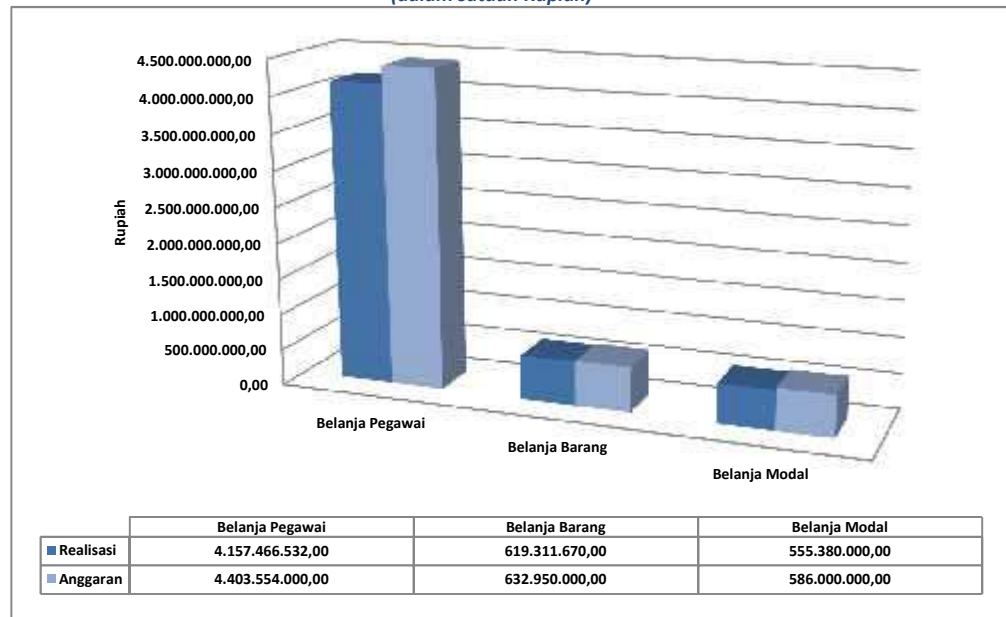
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 5.332.158.202 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 94,83% dari anggaran senilai Rp. 5.622.504.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2016		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.403.554.000	4.157.466.532	94,41
Belanja Barang	632.950.000	619.311.670	97,84
Belanja Modal	586.000.000	555.380.000	94,77
Total Belanja Bruto	5.622.504.000	5.332.343.307	94,84
Pengembalian Belanja		(185.105)	0
Total Belanja Netto	5.622.504.000	5.332.158.202	94,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 382.432.750 atau sebesar 6,69 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Berkurangnya jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kisaran, baik karena mutasi, pensiun, maupun meninggal dunia.

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	4.157.466.532	4.644.257.949	(486.791.417)	(10,48)
Belanja Barang	619.311.670	589.871.878	29.439.792	4,99
Belanja Modal	555.380.000	480.461.125	74.918.875	15,59
Total Belanja	5.332.158.202	5.714.590.952	(382.432.750)	(6,69)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
4.157.466.532*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 4.157.466.532,- dan Rp. 4.644.257.949,-.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masih berada di bawah realisasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 506.791.417,- atau sebesar 10,48 persen dari realisasi per 31 Desember 2015. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Berkurangnya Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran baik karena mutasi, pensiun, maupun meninggal dunia

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.855.147.241	1.833.007.720	22.139.521	1,20
Beban Pembulatan Gaji	23.985	48.630	(24.645)	(50,67)
PNS				
Beban Tunj. Suami/Istri	136.124.462	149.576.378	(13.451.916)	(8,99)
PNS				
Beban Tunj. Anak PNS	41.046.568	46.192.667	(5.146.099)	(11,14)
Beban Tunj. Struktural	39.520.000	32.360.000	7.160.000	22,12
PNS				
Beban Tunj. Fungsional	1.464.305.000	1.877.255.000	(412.950.000)	(21,99)
PNS				
Beban Tunj. PPh PNS	187.723.601	268.912.698	(81.189.097)	(30,19)
Beban Tunj. Beras PNS	98.418.780	112.247.640	(13.828.860)	(12,31)
Beban Uang Makan PNS	285.060.000	312.004.000	(26.944.000)	(8,63)
Beban Tunjangan	11.570.000	16.725.000	(5.155.000)	(30,82)
Umum PNS				
Beban Uang Lembur	38.712.000	0	38.712.000	0,00
Total Belanja Brutto	4.157.651.637	4.648.329.733	(490.678.096)	(10,55)
Pengembalian Belanja	(185.105)	(4.071.784)	3.886.679	(95,45)
Total Belanja Netto	4.157.466.532	4.644.257.949	(486.791.417)	(10,48)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp619.311.670*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 619.311.670 dan Rp. 589.871.878.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 29.439.792,- atau sebesar 4,99 persen dari realisasi tahun anggaran 2015. Hal ini disebabkan karena:

1. Meningkatnya pagu anggaran Belanja Barang pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015;
2. Meningkatnya kinerja para Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	244.190.323	268.604.519	(24.414.196)	(9,08)
Belanja Barang Non Operasional	31.398.871	27.606.678	3.792.193	13,73
Belanja Jasa	41.510.667	52.661.852	(11.151.185)	(21,17)
Belanja Pemeliharaan	173.656.830	161.435.829	12.221.001	7,57
Belanja Perjalanan Dinas	79.414.040	79.563.000	(148.960)	-0,18
Total Belanja Brutto	619.311.670	589.871.878	29.439.792	4,99
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	619.311.670	589.871.878	29.439.792	4,99

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal : Rp.
555.380.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 555.380.000 dan Rp. 480.461.125.

Realisasi Belanja Modal TA 2016 meningkat sebesar Rp. 74.918.875,- atau sebesar 15,59 persen dari realisasi tahun anggaran 2015. Hal ini disebabkan antara lain

1. Meningkatnya pagu anggaran Belanja Modal pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015;
2. Meningkatnya kinerja para Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	85.855.000	480.461.125	(394.606.125)	(98,45)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	469.525.000	0	469.525.000	0,00
Total Belanja Brutto	555.380.000	480.461.125	74.918.875	15,59
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	555.380.000	480.461.125	74.918.875	15,59

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 34.442.015

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.442.015,- dan Rp. 2.969.350.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2016 dan TA 2015 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	14.736.770	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	0	1.650.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	0	(8.250)
Persediaan	19.705.245	1.327.600
Total Aset Lancar	34.442.015	2.969.350

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 karena telah seluruhnya dipertanggungjawabkan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2016	31 Desember TA 2015
1.	Saldo UP	0	0
2.	Kuitansi UP	0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi: Rp. 0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.650.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	TGR an. AZHAR, SH.	0	1.650.000
Jumlah		0	1.650.000

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	1.650.000
Mutasi Kurang	
) Pelunasan atas TGR an AZHAR, SH.	1.650.000
Saldo per 31 Desember 2016	0

C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Bagian Lancar
TP/TGR : Rp. 0*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. (8.250). Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas					Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
		N	I	H	I	L		
Total								

C.1.4. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 19.705.245*

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.705.245 dan Rp. 1.327.600. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember 2015			
No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Barang Konsumsi	19.705.245	1.307.600
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	20.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		19.705.245	1.327.600

Semua jenis Persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp7.778.606.426*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing tersaji sebesar Rp. 7.778.606.426,- dan Rp. 7.874.850.591,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)				
No.	Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan
1	Tanah	2.456.455.000	2.456.455.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.399.048.359	1.313.193.359	85.855.000
3	Gedung dan Bangunan	6.862.034.649	6.392.509.649	469.525.000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	150.225.000	150.225.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	5.326.811	7.271.288	1.944.477
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	10.873.089.819	10.319.654.296	0
	Akumulasi Penyusutan	(3.094.483.393)	(2.444.803.705)	(649.679.688)
	Nilai Buku Aset Tetap	7.778.606.426	7.874.850.591	(96.244.165)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
2.456.455.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.456.455.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Saldo Tanah						
No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	3.769	SHP No.39	Pem. RI cq. MA	Gedung Kantor	1.531.314.000
2.	2	1.500	SHP No. P1	Pem. RI cq. MA	Gedung Kantor	76.100.000
3.	1	776	SHP No. 1	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	212.712.000
4.	2	225	SHP No.14	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	60.664.000
5.	4	1.967	SHP No.7	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	180.000.000
6.	5	200	SHP No. P1	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	57.734.558
7.	6	399	SHP No. 2	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	115.180.442
8	7	650	SHP No. 36	Pem. RI cq. MA	Rumah Negara	222.750.000
	Jumlah					2.456.455.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.399.048.359*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.399.048.359,- dan Rp. 1.313.193.359.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	1.313.193.359
Mutasi Tambah	85.855.000
Mutasi Kurang	0

Saldo per 31 Desember 2016	1.399.048.359
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	(974.855.945)
Nilai Buku 31 Desember 2016	424.192.414

Mutasi tambah untuk aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 85.855.000,- adalah berupa peralatan pengolah data yang terdiri dari 2 (dua) unit Notebook; 3 (tiga) set Personal Computer; 3 (tiga) unit Printer; 1 (satu) unit Scanner; dan 1 (satu) unit Router.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
6.862.034.649*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.862.034.649,- dan Rp. 6.392.509.649.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	6.392.509.649
Mutasi Tambah	469.525.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2016	6.862.034.649
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	(2.066.480.573)
Nilai Buku 31 Desember 2016	4.795.554.076

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp. 150.225.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 150.225.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	150.225.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2016	150.225.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	(53.146.875)
Nilai Buku 31 Desember 2016	97.078.125

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
5.326.811*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.326.811,- dan Rp. 7.271.288,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	7.271.288,-
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	1.944.477
Saldo per 31 Desember 2016	5.326.811
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	5.326.811

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan :
Rp. 0,-*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.
(3.094.483.393)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. (3.094.483.393) dan Rp.(2.444.803.705).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.456.455.000	0	2.456.455.000
2	Peralatan dan Mesin	1.399.048.359	(974.855.945)	424.192.414
3	Gedung dan Bangunan	6.862.034.649	(2.066.480.573)	4.795.554.076
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	150.225.000	(53.146.875)	97.078.125
5	Aset Tetap Lainnya	5.326.811	0	5.326.811
	Jumlah	10.873.089.819	(3.094.483.393)	7.778.606.426

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp. 1.579.250,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.579.250 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Utang kepada Pihak Ketiga	1.579.250	0
Jumlah	1.579.250	0

C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp. 1.579.250*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.579.250 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran kepada pihak lain, berupa Tagihan Pengiriman Surat Dinas dari Kantor Pos Kisaran Nomor 1804/Penjualan/1216 Tanggal 29 Desember 2016 sebesar jumlah tersebut di atas.

C.4. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
7.811.469.191*

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.811.469.191 dan Rp. 7.877.819.941. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. 66.350.750,- (0,84%) dari nilai per 31 Desember 2015.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB : Rp4.801.619 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 4.801.619 dan Rp. 8.348.150. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.347.962	3.862.059	115,35
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11.495.660	939.560	8,17
	Total Pendapatan	14.843.622	4.801.619	32,35

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 4.142.729.762 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.142.729.762 dan Rp. 4.644.257.949. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.842.220.531	1.833.007.720	9.212.811	0,50
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.559	35.246	(11.687)	(33,15)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	134.831.791	149.576.378	(14.744.587)	(9,85)
Beban Tunj. Anak PNS	40.529.500	46.192.667	(5.663.167)	(12,25)
Beban Tunj. Struktural PNS	39.520.000	32.360.000	7.160.000	22,12
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.464.305.000	1.877.255.000	(412.950.000)	(21,99)
Beban Tunj. PPh PNS	187.723.601	268.912.698	(81.189.097)	(30,19)
Beban Tunj. Beras PNS	98.418.780	108.929.240	(10.510.460)	(9,64)
Beban Uang Makan PNS	285.060.000	312.004.000	(26.944.000)	(8,63)
Beban Tunjangan Umum PNS	11.385.000	15.985.000	(4.600.000)	(28,77)
Beban Uang Lembur	38.712.000	0	38.712.000	0,00
Total Beban Pegawai	4.142.729.762	4.644.257.949	(501.528.187)	(10,79)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 29.716.599*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.716.599 dan Rp. 17.485.859. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	29.716.599	17.485.859	12.230.740	69,94
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	29.716.599	17.485.859	12.230.740	69,94

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp. 318.679.111*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 318.679.111 dan Rp. 326.628.949. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	185.024.600	162.676.864	22.347.736	13,73
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.184.973	16.599.920	3.585.053	21,59
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	61.540.000	(24.580.000)	(39,94)
Beban Barang Operasional Lainnya	3.600.000	5.543.635	(1.943.635)	(35,06)
Beban Bahan	15.484.000	10.488.500	4.995.500	47,62
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.914.871	17.118.178	(1.203.307)	(7,02)
Beban Langganan Listrik	38.199.148	47.943.942	(9.744.794)	(20,32)
Beban Langganan Telepon	3.311.519	4.717.910	(1.406.391)	(29,80)
Total Beban Jasa	318.679.111	326.628.949	(7.949.838)	(2,43)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 178.441.400*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 178.441.400 dan Rp. 166.007.929. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya

yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.369.260	91.837.700	(11.468.440)	(12,48)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.320.870	66.598.129	22.722.741	34,11
Beban Pemeliharaan Jaringan	3.966.700	3.000.000	966.700	32,22
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4.784.570	4.572.100	212.470	4,64
Total Beban Pemeliharaan	178.441.400	166.007.929	12.433.471	7,48

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp 79.414.040.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 79.414.040 dan Rp 79.563.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	79.414.040	79.563.000	(148.960)	(0,18)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	79.414.040	79.563.000	(148.960)	(0,18)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial

merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp. 423.965.897*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing tersaji sebesar Rp. 423.965.897 dan Rp. 388.691.537. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140.344.417	110.099.321	30.245.096	27,47
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	276.485.230	270.170.251	6.314.979	2,33
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.136.250	7.136.250	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	423.965.897	388.691.537	35.274.360	9,07
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	423.965.897	388.691.537	35.274.360	9,07

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih :
Rp. (8.250)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. (8.250) dan Rp. (33.000). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	(24.750)	24.750	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(8.250)	(8.250)	0	0,00
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	(8.250)	(33.000)	24.750	75,00

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp . 5.312.675

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	21.900.000	(21.900.000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1.284.714	(1.284.714)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.657.159	2.315.700	3.341.459	(31,99)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	344.484	0	344.484	0
Total Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.312.675	2.315.700	2.996.975	(31,99)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa :
Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Beban Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.877.819.941 dan Rp. 8.448.722.267

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 5.162.824.265 dan Rp. 5.591.324.087. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 768.569. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0

Total Koreksi Nilai Persediaan

0

3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 227.658.268 dan Rp. 655.774.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.324.131.783 dan Rp. 5.675.427.102.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp. 5.332.158.202, sedangkan DKEL sebesar Rp. 8.026.419.

2. Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Tidak ada nilai Transfer Masuk maupun Transfer Keluar pada Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2016. Begitu juga dengan Pengesahan Hibah Langsung yang merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp 0.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.811.469.191 dan Rp. 7.877.819.941.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Sampai dengan Laporan Keuangan ini selesai disusun tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang mempengaruhi Laporan Keuangan sehingga layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK sebagaimana dalam lampiran.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dalam tabel berikut ini;

No.	Pendapatan/belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrua		Realisasi Menurut Basis Akrua	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.855.147.241,00	0,00	12.926.710,00	1.842.220.531,00	SKPP, SP2D,SPM, SK Mutasi, SK Permintaan Persekot Gaji dari Pegawai yang bersangkutan
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.880,00	0,00	321,00	23.559,00	SKPP, SP2D,SPM, SK Mutasi, SK Permintaan Persekot Gaji dari Pegawai yang bersangkutan
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	136.124.462,00	0,00	1.292.671,00	134.831.791,00	SKPP, SP2D,SPM, SK Mutasi, SK Permintaan Persekot Gaji dari Pegawai yang bersangkutan
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	41.046.568,00	0,00	517.068,00	40.529.500,00	SKPP, SP2D,SPM, SK Mutasi, SK Permintaan Persekot Gaji dari Pegawai yang bersangkutan
5	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.605.723,00	1.579.250,00	0,00	20.184.973,00	Tagihan Pengiriman Surat Dinas dari Kantor Pos Kisaran Nomor 1804/Penjualan/1216 Tanggal 29 Desember 2016
Jumlah			2.050.947.874,00	1.579.250,00	14.736.770,00	2.037.790.354,00	

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Kisaran adalah:

1. BRI Cab. Kisaran A/C 032301000031300 a.n. RPL 076 KISARAN yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 312.705.325,-.
2. BRI CAB. WAHIDIN KISARAN A/C 0323-01-00007530-4 a.n. BPG 076 PENGADILAN NEGERI KISARAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.

3. BRI KC KISARAN A/C 0323-01-00042330-3 a.n. BPG 076 PENGADILAN NEGERI KISARAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.

F.2.4. Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2016, Nomor DIPA-005.0.3.400389/2016 tanggal 07 Desember 2015, *Digital Stamp* 2626-3921-3008-4404, total pagu Rp. 5.595.004.000,-, mengalami 3 (tiga) kali revisi selama tahun 2016 yaitu sebagai berikut;

1. Revisi 1 dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.400389/2016 Revisi ke 01 Tanggal 11 April 2016, *Digital Stamp* 2626-3921-3008-4404. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu, hanya berupa perubahan nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dari NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. menjadi JULIARNO, SH;
2. Revisi 2 dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.400389/2016 Revisi ke 02 Tanggal 04 November 2016, *Digital Stamp* 0019-5113-8038-4668. Revisi tersebut merupakan revisi dengan penambahan pagu, yaitu pada pos-pos Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan Belanja Langganan Listrik masing-masing sebesar Rp. 8.500.000,- dan Rp. 19.000.000,-, sehingga total pagu setelah revisi menjadi Rp. 5.622.504.000,-;
3. Revisi 3 dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.400389/2016 Revisi ke 03 Tanggal 23 November 2016, *Digital Stamp* 0019-5113-8038-4668. Revisi tersebut merupakan revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam satu keluaran, satu kegiatan, dan satu satker dala hal pagu anggaran tetap untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional serta *update* Halaman III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM pada Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut;

1. Ralat atas SPM nomor 00076/400389/LS/2016 tanggal 01 – 11 – 2016 dengan SP2D nomor 160761304000264 tanggal 02 – 11 – 2016 yang merupakan koreksi Uraian SPM dimana tertulis Pembayaran Lunas (100%) Perencanaan Penataan Halaman Kantor dan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Kisaran TA. 2016 sesuai SPK No. W2.U11/11/PI.08/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, BAST No.

- W2.U11/14/Pl.08.IV/2016 tanggal 11 April 2016, BAP No. W2.U11/15/Pl.08/IV/2016 tanggal 13 April 2016, seharusnya tertulis Pembayaran Belanja Modal berupa Pembayaran Lunas (100%) Perencanaan Penataan Halaman Kantor dan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2016 sesuai SPK No. W2.U11/11/Pl.08/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, BAST No. W2.U11/14/Pl.08/IV/2016 tanggal 07 April 2016, BAP No. W2.U11/15/Pl.08/IV/2016 tanggal 08 April 2016;
2. Ralat atas SPM nomor 00077/400389/LS/2016 tanggal 01 – 11 – 2016 dengan SP2D nomor 160761304000263 tanggal 02 – 11 – 2016 yang merupakan koreksi Uraian SPM dimana tertulis Pembayaran Lunas (100%) Pengawasan Pekerjaan Penataan Halaman Kantor dan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Kisaran TA. 2016 sesuai SPK No. W2.U11/21/Pl.08/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, BAST No. W2.U11/24/Pl.08/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, BAP No. W2.U11/25/Pl.08/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, seharusnya tertulis Pembayaran Belanja Modal berupa Pembayaran Lunas (100%) Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Halaman Kantor dan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Kisaran TA. 2016 sesuai SPK No. W2.U11/21/Pl.08/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, BAST No. W2.U11/24/Pl.08/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, BAP No. W2.U11/25/Pl.08/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

DIPA Pengadilan Negeri Kisaran tahun Anggaran 2016 dikelola oleh;

Kuasa Pengguna Anggaran : **JULIARNO, SH.**

Sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 60/ SEK/ SK/ XII/ 2015 Tanggal 23 Desember 2015

Pejabat Pembuat Komitmen : **CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.**

Pejabat Penandatanganan SPM : **NONI AFRIANTI DAMANIK, SH.**

Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kisaran No. W2-U11/ 22/ Ku.03.02/I/ 2016 Tanggal 05 Januari 2016

Bendahara Pengeluaran : **AGNES F. PATTINAMA**

Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kisaran No. W2-U11/ 30/ Ku.03.02/I/ 2016 Tanggal 06 Januari 2016.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Kisaran
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2015	Beban Penyusutan 2016	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2016	Nilai Buku Per 31 Desember 2016
A.	Peralatan dan Mesin		1,399,048,359	836,392,735	140,344,417	-1,881,207	424,192,414
1.	Alat Bantu	7	1,500,000	616,071	205,357	-71,429	750,001
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	248,441,234	236,732,968	11,708,266	0	0
3.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	187,000	187,000	0	0	0
4.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	2,290,000	2,061,000	229,000	0	0
5.	Alat Pengolahan	4	2,500,000	2,500,000	0	0	0
6.	Alat Kantor	5	180,517,000	93,185,400	21,990,800	0	65,340,800
7.	Alat Rumah Tangga	5	606,111,125	269,365,963	84,703,675	-1,557,001	253,598,488
8.	Alat Studio	5	6,035,000	3,111,500	893,500	0	2,030,000
9.	Alat Komunikasi	5	33,942,000	33,942,000	0	0	0
10.	Peralatan Pemancar	10	6,500,000	1,895,833	631,944	-252,777	4,225,000
11.	Komputer Unit	4	239,150,000	174,250,000	8,112,500	0	56,787,500
12.	Peralatan Komputer	4	71,875,000	18,545,000	11,869,375	0	41,460,625
B.	Gedung dan Bangunan		6,862,034,649	1,562,400,345	276,485,230	227,594,998	4,795,554,076
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5,853,337,650	1,343,598,439	247,195,250	-22,073,371	4,284,617,332
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1,008,696,999	218,801,906	29,289,980	249,668,369	510,936,744

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		150,225,000	46,010,625	7,136,250	0	97,078,125
1.	Jaringan Listrik	40	15,000,000	2,062,500	375,000	0	12,562,500
2.	Jaringan Telepon	20	135,225,000	43,948,125	6,761,250	0	84,515,625
D.	Aset Tetap Lainnya		5.326.811	0	0	0	5.326.811
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	5.326.811	0	0	0	5.326.811
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0
2.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	0	0	0	0	0
3.	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
4.	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
5.	Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	0
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	0	0	0	0
7.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8,416,634,819	2,444,803,705	423,965,897	225,713,791	5.322.151.426
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		8,416,634,819	2,444,803,705	423,965,897	225,713,791	5.322.151.426

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Negeri Kisaran
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
N I H I L							
			Jumlah :				



Catatan atas Laporan Keuangan

005
01
0700
400389

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember TAHUN 2016

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT